

**THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR SALE GOODS EX
FLOODED WITH HIDDEN DEFECTS BASED ON LAW NUMBER 8 OF
1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION
(Juridical Review of Court Decision Number 930/Pid.Sus/2021/PN.BDG)**

ABSTRACT

By :

Faizal Arkanvijaya Fawwaz

E1B019008

Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. This research was conducted on Ruling Number 930/Pid.Sus/2021/PN.BDG regarding the actions of Business Actors who traded processed food goods and household needs, used Alfamart flooded which were damaged and defective by way of a sale as if the goods had no hidden defects.

The approach method used in this study is Normative Juridical with descriptive analytical research specifications. The data sources used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained will be analyzed using qualitative normative data analysis methods and presented in the form of narrative text which is arranged systematically, logically, and rationally.

Based on the results of the research conducted, it was found that Business Actors have been responsible as stipulated in Article 62 paragraph (2) in conjunction with Article 11 letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, this is stated in the judge's decision contained in the Bandung District Court Decision Number 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. The legal consequence for the actions of Business Actors who have traded ex-flooded goods with hidden defects is that the business actor is found guilty of violating the provisions contained in Article 62 paragraph (2) in conjunction with Article 11 letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, so that Business Actors are given criminal sanctions in the form of imprisonment for 8 (eight) months.

Keywords : *Responsibilities, Business Actors, Hidden Defects, Flooded Goods.*

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN BARANG EX
KEBANJIRAN YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI
BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

(Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN.BDG)

ABSTRAK

Oleh :

Faizal Arkanvijaya Fawwaz

E1B019008

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN.BDG mengenai tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan barang pangan olahan dan kebutuhan rumah tangga ex Alfamart kebanjiran yang mengalami kerusakan dan cacat dengan cara obral seolah-olah barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis data normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Pelaku Usaha sudah bertanggung jawab sebagaimana telah diatur pada Pasal 62 ayat (2) juncto Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut tercantum dalam amar putusan hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, Akibat hukum atas tindakan Pelaku Usaha yang telah memperdagangkan barang ex kebanjiran yang cacat tersembunyi adalah pelaku usaha dinyatakan bersalah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 62 ayat (2) juncto Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Pelaku Usaha diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Cacat Tersembunyi, Barang Ex Kebanjiran.*